



DAFTAR ISI

NASKAH TESIS	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
ABSTRACT	vi
INTISARI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Pertanyaan Penelitian	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kontribusi Penelitian	14
E. Keluaran Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengantar	16
B. Keaslian Penelitian	17
C. Kebijakan Pengendalian Pembangunan Hotel	20
D. Kegagalan Kebijakan Pengendalian Pembangunan Hotel	23
E. <i>Stakeholder</i> dalam kebijakan moratorium hotel	27
F. Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Objek Penelitian	40
C. Teknik Pengumpulan Data	40
1. Studi dokumentasi	40
2. Wawancara	42
3. Observasi	45
4. Audio Visual	46
D. Teknik Validasi Data	46
E. Teknik Analisis Data	46
1. Reduksi	47
2. Penyajian	47
3. Verifikasi data	47



BAB IV PERKEMBANGAN KEBIJAKAN JASA AKOMODASI DI KOTA YOGYAKARTA	49
A. Pengantar	49
B. Profil Kota Yogyakarta	49
C. Tinjauan Kebijakan Tata Ruang Provinsi DIY dan Kota Yogyakarta	51
D. Kondisi Sosial Budaya Kota Yogyakarta	54
BAB V KONFLIK KEPENTINGAN STAKEHOLDER DALAM KASUS MORATORIUM HOTEL	60
A. Kepentingan <i>Stakeholder</i> dalam Kebijakan Moratorium Hotel	60
1. Kepentingan Aktor Pemerintah	63
a. Pemerintah Kota	64
b. Pemerintah Provinsi	75
c. DPRD Kota	80
2. Kepentingan Aktor Non-negara	85
a. Lembaga Swadaya Masyarakat	86
b. Bank	90
c. Anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)	92
d. Media Massa	94
B. Konflik Kepentingan diantara Stakeholder.	98
C. Komitmen Politik Pemerintah Kota	102
1. Pemberian izin IMB kepada hotel lama sebelum moratorium.	104
2. Penerbitan izin IMB kepada 67 izin hotel baru	106
3. Perpanjangan Masa Pembangunan Hotel Selama (6) Enam Bulan Sebanyak 3 Periode.	109
4. Penerbitan Izin Pengembangan Hotel Non-bintang	109
5. Kerahasiaan Informasi Terkait Jumlah dan Nama Hotel yang mendapatkan IMB.	110
6. Pelanggaran Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)	115
BAB VI. NEGOSIASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	122
A. Respon PHRI	123
1. Pendekatan personal untuk mendorong pembatasan izin	123



2. Kemitraan dengan pengusaha hotel baru sebagai strategi untuk menghadapi persaingan pasar perhotelan.	129
B. Respon Pengusaha Hotel Baru	131
1. Praktik lobi untuk mempermudah izin	131
2. Kerjasama dengan pengusaha hotel non-bintang untuk mengembangkan hotel menjadi hotel bintang.	133
3. Respon Gubernur	135
1. Pendekatan personal untuk membatasi izin hotel	135
2. Penegakan aturan RTRW Kota/Kabupaten untuk mengantisipasi pelanggaran izin	138
3. Penggunaan media massa untuk merubah persepsi publik	142
4. Respon DPRD	144
5. Aksi Protes sebagai strategi komunikasi warga	150
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	156
A. Kesimpulan	156
B. Saran	158
DAFTAR PUSTAKA	159